

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI BPKPAD KABUPATEN KLATEN (STUDI KASUS PADA BAGIAN PERBENDAHARAAN)

Oleh:

¹Yesti Sari, ²Mia Rosmiati

^{1,2}Program Studi Administrasi Keuangan Publik, Departemen Ilmu Terapan, Sekolah Vokasi,
Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang,
Jawa Barat 45363.

e-mail : yesti22001@mail.unpad.ac.id¹, m.rosmiati@unpad.ac.id²

ABSTRACT

The implementation of the Regional Government Information System (SIPD) is part of the government's efforts to achieve integrated, transparent, and accountable regional financial management. BPKPAD of Klaten Regency has started using SIPD to replace SIMDA; therefore, an evaluation of its implementation, especially in the Treasury Division, is necessary. This study aims to analyze the implementation of SIPD using the DeLone and McLean information system success model, which consists of six dimensions: information quality, system quality, service quality, use, user satisfaction, and net benefits. This study employs a qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews and observation of employees who use SIPD. The results show that SIPD has helped improve the efficiency and effectiveness of regional financial management at BPKPAD of Klaten Regency. In terms of information quality, SIPD is able to provide sufficiently accurate and relevant data. In terms of system quality, SIPD is considered quite easy to use, although it still experiences technical disruptions at certain times. The service quality of the system manager is considered quite good, although handling disruptions still requires time. SIPD has become part of daily work activities, and in general, users are quite satisfied. In addition, SIPD also provides benefits in increasing transparency and accountability, as well as supporting decision-making in regional financial management.

Keywords: *SIPD, DeLone and McLean, Information System, Regional Financial Management*

ABSTRAK

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. BPKPAD Kabupaten Klaten mulai menggunakan SIPD sebagai pengganti SIMDA, sehingga diperlukan evaluasi terhadap implementasinya, khususnya di Bagian Perbendaharaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIPD menggunakan model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean yang meliputi enam dimensi, yaitu kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas pelayanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pegawai pengguna SIPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di BPKPAD

Kabupaten Klaten. Dari sisi kualitas informasi, SIPD mampu menyediakan data yang cukup akurat dan relevan. Dari sisi kualitas sistem, SIPD dinilai cukup mudah digunakan, meskipun masih mengalami gangguan teknis pada waktu tertentu. Kualitas pelayanan pengelola sistem dinilai cukup baik, meskipun penanganan gangguan masih membutuhkan waktu. SIPD telah menjadi bagian dari aktivitas kerja sehari-hari dan secara umum pengguna merasa cukup puas. Selain itu, SIPD juga memberikan manfaat dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: SIPD, DeLone dan McLean, Sistem Informasi, Pengelolaan Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Dalam era desentralisasi dan reformasi birokrasi, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penerapan prinsip desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengelola urusan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, perluasan kewenangan tersebut juga membawa konsekuensi meningkatnya risiko inefisiensi, kesalahan administrasi, dan penyalahgunaan wewenang apabila tidak didukung oleh sistem pengelolaan dan pengawasan yang memadai.

Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong transformasi tata kelola pemerintahan. Penerapan sistem informasi dalam administrasi publik tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pengambilan keputusan berbasis data. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, digitalisasi menjadi sangat krusial karena mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan.

Sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menetapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem nasional terintegrasi untuk pengelolaan data pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. SIPD dirancang untuk menggantikan sistem sebelumnya (SIMDA) dengan tujuan mewujudkan integrasi data pusat dan daerah, meningkatkan efisiensi administrasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Pemerintah Kabupaten Klaten melalui BPKPAD mulai mengimplementasikan SIPD sejak tahun 2024, khususnya pada Bagian Perbendaharaan. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, implementasi SIPD masih menghadapi berbagai kendala, antara lain gangguan teknis berupa *server error* akibat tingginya trafik pengguna serta adanya proses penyesuaian (adaptasi) pengguna terhadap sistem baru yang memiliki alur kerja dan mekanisme yang berbeda dibandingkan sistem sebelumnya. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya kelancaran proses penatausahaan dan pelaporan keuangan, yang salah satunya ditunjukkan dengan bukti administratif berupa Surat Nomor B/900.1.1/2573/2024/30/M yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri c.q. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten harus melakukan proses *recovery/restore* data dalam sistem SIPD-RI pada saat perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun SIPD dirancang sebagai sistem terintegrasi nasional, dalam praktiknya masih terdapat tantangan implementasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap implementasi SIPD dari perspektif pengguna untuk mengetahui sejauh mana sistem ini benar-benar mendukung kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Bagian Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Klaten menggunakan model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi terkait dalam upaya penyempurnaan implementasi SIPD, serta secara akademik dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai evaluasi sistem informasi sektor publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi Keuangan Publik

Administrasi pada dasarnya berasal dari kata *ad* dan *ministro* yang berarti melayani, sehingga administrasi dipahami sebagai kegiatan pelayanan terhadap suatu tujuan tertentu (Siswandi, 2017). Dalam arti sempit, administrasi berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan seperti pencatatan dan surat-menyurat, sedangkan dalam arti luas mencakup seluruh proses kerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Keuangan publik sendiri merupakan seluruh kekayaan negara yang dapat dinilai dengan uang dan dikelola dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Anggara, 2016), sebagaimana juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dengan demikian, administrasi keuangan publik dapat dipahami sebagai keseluruhan proses pengelolaan keuangan negara atau daerah yang dilakukan secara sistematis, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintahan.

Model Keberhasilan Sistem Informasi DeLone dan McLean

Model keberhasilan sistem informasi yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 dan disempurnakan pada tahun 2003 sebagai kerangka evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas suatu sistem informasi (DeLone & McLean, 2018). Model ini menyatakan bahwa keberhasilan sistem informasi dapat diukur melalui enam dimensi utama, yaitu:

- a. **Kualitas Informasi**
Kualitas informasi menggambarkan sejauh mana informasi yang dihasilkan sistem memiliki tingkat akurasi, kelengkapan, relevansi, dan ketepatan waktu yang memadai untuk mendukung pekerjaan dan pengambilan keputusan pengguna.
- b. **Kualitas Sistem**
Kualitas sistem berkaitan dengan kinerja teknis sistem, yang meliputi kemudahan penggunaan, keandalan, kecepatan akses, fleksibilitas, serta keamanan sistem dalam melindungi data.
- c. **Kualitas Pelayanan**
Kualitas pelayanan menunjukkan mutu dukungan yang diberikan oleh pengelola sistem kepada pengguna, yang dapat dilihat dari aspek jaminan layanan, empati, dan daya tanggap dalam menangani permasalahan.
- d. **Penggunaan**
Penggunaan (*use*) mencerminkan tingkat pemanfaatan sistem oleh pengguna, baik dari sisi frekuensi maupun cara penggunaannya dalam mendukung aktivitas kerja.
- e. **Kepuasan Pengguna**

Kepuasan pengguna menggambarkan sikap dan persepsi pengguna terhadap sistem secara keseluruhan, apakah sistem tersebut telah memenuhi harapan dan kebutuhan kerja mereka.

f. Manfaat Bersih

Manfaat bersih (*net benefits*) menunjukkan dampak akhir dari penggunaan sistem informasi, baik bagi individu maupun organisasi, seperti peningkatan efisiensi kerja, produktivitas, serta kualitas tata kelola organisasi.

Model ini relevan digunakan untuk mengevaluasi implementasi SIPD karena mampu menggambarkan keberhasilan sistem dari sisi teknis, pengguna, dan dampak organisasional.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 sebagai sarana pengelolaan informasi pemerintahan daerah yang terintegrasi. SIPD didefinisikan sebagai sistem yang digunakan untuk mengelola informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung dan dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SIPD dirancang untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara terintegrasi (Nasution & M.Si, 2021). Melalui sistem ini, seluruh data keuangan daerah dikelola dalam satu basis data nasional, sehingga dapat meningkatkan konsistensi perencanaan dan realisasi anggaran serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Benny Eko Supriyanto, 2024).

Lebih lanjut, SIPD juga berfungsi sebagai instrumen sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Basis data yang dihasilkan SIPD dimanfaatkan untuk memantau kemampuan fiskal daerah, pola belanja, serta capaian pembangunan, sehingga mendukung proses pembinaan, pengawasan, dan evaluasi oleh pemerintah pusat (Kurniawan, 2024). Dengan demikian, SIPD tidak hanya berperan sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai bagian penting dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi (Perpres No. 95 Tahun 2018).

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi keuangan daerah berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan keuangan. (Iwan Ahmad Puji Santoso, 2025) menyatakan bahwa digitalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah mampu meningkatkan akuntabilitas, ketepatan waktu, serta kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, (Wurara et al., 2024) menyebutkan bahwa SIPD membantu mempercepat proses administrasi keuangan, meskipun masih menghadapi kendala teknis terutama pada aspek stabilitas sistem. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun SIPD memberikan manfaat yang signifikan, evaluasi dari perspektif pengguna tetap diperlukan untuk memastikan sistem berjalan optimal, khususnya pada level operasional seperti di Bagian Perbendaharaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Bagian Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten, khususnya terkait proses penerapan, kendala, serta manfaat yang dirasakan oleh pengguna sistem.

Penelitian dilaksanakan di BPKPAD Kabupaten Klaten, khususnya pada Bagian Perbendaharaan. Subjek penelitian ditentukan secara purposive, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penggunaan dan pengelolaan SIPD, yang terdiri dari Kepala Bidang Perbendaharaan, Sub Koordinator Perbendaharaan, pegawai pelaksana, serta tim pendamping SIPD.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap aktivitas penggunaan SIPD di lingkungan BPKPAD Kabupaten Klaten. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, surat edaran, pedoman teknis SIPD, serta laporan dan arsip terkait pengelolaan keuangan daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pengalaman, persepsi, serta kendala yang dihadapi pengguna SIPD. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses penggunaan sistem dalam kegiatan penatausahaan keuangan. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data melalui penelaahan dokumen-dokumen pendukung.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berulang sejak pengumpulan data hingga diperoleh kesimpulan yang utuh dan mendalam.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang memiliki peran berbeda dalam implementasi SIPD.

Sebagai kerangka analisis, penelitian ini menggunakan model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean, yang mencakup enam dimensi, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas Informasi (Information Quality) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Dalam model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean, kualitas informasi merupakan salah satu dimensi utama yang menentukan keberhasilan suatu sistem informasi. Kualitas informasi mencerminkan sejauh mana informasi yang dihasilkan sistem memiliki tingkat akurasi, kelengkapan, relevansi, ketepatan waktu, dan kejelasan, sehingga dapat mendukung kebutuhan pengguna dalam menjalankan tugas serta proses pengambilan keputusan.

Pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), kualitas informasi memegang peranan penting karena sistem ini digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran,

penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah. Informasi yang dihasilkan SIPD tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi dasar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, SIPD tidak sekadar berperan sebagai alat pencatatan, melainkan sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan data keuangan daerah yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penilaian kualitas informasi SIPD di Bagian Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Klaten dalam penelitian ini difokuskan pada lima indikator utama, yaitu akurasi, kelengkapan, relevansi, ketepatan waktu, dan kejelasan informasi. Kelima indikator tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana informasi yang dihasilkan SIPD mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas serta membantu proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah.

1. Akurasi Informasi

Akurasi informasi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas informasi pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Akurasi menunjukkan sejauh mana data dan informasi yang dihasilkan sistem sesuai dengan kondisi sebenarnya, bebas dari kesalahan, serta dapat dipercaya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Bagian Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Klaten, informasi yang dihasilkan SIPD dinilai cukup akurat. Informan menyampaikan bahwa tingkat akurasi sangat dipengaruhi oleh proses input data yang dilakukan oleh pengguna. Apabila data diinput dengan benar, sistem mampu mengolah dan menyajikannya menjadi informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa secara sistem, SIPD telah mendukung penyajian informasi yang akurat, meskipun ketelitian pengguna tetap menjadi faktor penentu.

Namun demikian, pada kondisi tertentu, akurasi informasi masih dapat terpengaruh oleh kendala teknis, seperti gangguan server atau keterlambatan sinkronisasi data, yang menyebabkan informasi belum sepenuhnya terbaru. Meskipun demikian, secara umum SIPD telah mampu menyediakan informasi yang cukup akurat untuk mendukung proses penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan daerah di BPKPAD Kabupaten Klaten.

2. Kelengkapan Informasi

Kelengkapan informasi merupakan salah satu aspek penting dalam menilai kualitas informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kelengkapan menunjukkan sejauh mana sistem mampu menyajikan data secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga dapat mendukung pemahaman yang utuh terhadap kondisi keuangan daerah dan kelancaran proses kerja.

Berdasarkan hasil wawancara di Bagian Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Klaten, SIPD dinilai telah menyediakan informasi yang cukup lengkap untuk mendukung proses penatausahaan dan pengawasan keuangan daerah, seperti data realisasi anggaran, laporan pencairan dana, serta data penerimaan dan pengeluaran.

Namun demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan, terutama terkait data yang belum sepenuhnya terintegrasi, seperti data BOS dan BUD, serta belum tersedianya beberapa fitur yang sebelumnya ada pada sistem SIMDA. Kondisi ini menyebabkan pada situasi tertentu masih diperlukan penyesuaian atau pelengkapan data secara manual. Meskipun demikian, secara umum SIPD dinilai telah mampu menyajikan informasi yang relatif lengkap dan membantu mendukung transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Relevansi Informasi

Relevansi informasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menunjukkan sejauh mana data dan laporan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang relevan sangat penting karena digunakan dalam proses pemantauan realisasi anggaran, pencairan dana, serta pengendalian pengeluaran dan penerimaan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai di Bagian Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Klaten, informasi yang dihasilkan SIPD dinilai cukup sesuai dengan kebutuhan kerja sehari-hari, khususnya terkait data realisasi anggaran dan laporan pencairan dana yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengawasan keuangan.

Meskipun demikian, beberapa informan menyampaikan bahwa masih terdapat kebutuhan informasi tertentu yang belum sepenuhnya terakomodasi, terutama terkait fitur-fitur yang sebelumnya tersedia pada sistem SIMDA namun belum tersedia di SIPD. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum SIPD telah menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat, tingkat kesesuaiannya masih perlu ditingkatkan agar dapat menjawab seluruh kebutuhan operasional di tingkat daerah. Secara keseluruhan, SIPD telah mampu menyajikan informasi yang kontekstual dan mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah, namun pengembangan sistem secara berkelanjutan tetap diperlukan agar relevansi informasi semakin optimal.

4. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu informasi menunjukkan sejauh mana informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat diakses dan digunakan oleh pengguna pada saat dibutuhkan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, aspek ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan batas waktu penatausahaan, pelaporan, serta proses pengambilan keputusan. Informasi yang terlambat dapat menghambat kelancaran administrasi dan memengaruhi kualitas kinerja organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai di Bagian Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Klaten, informasi yang dihasilkan SIPD dinilai tersedia secara tepat waktu karena sistem telah menggunakan mekanisme *real-time*. Selama proses input data dilakukan dengan benar dan tepat, informasi seperti realisasi anggaran, laporan pencairan, dan posisi kas dapat langsung diakses dan digunakan untuk keperluan verifikasi maupun pengambilan keputusan. Meskipun terkadang terjadi gangguan teknis, kondisi tersebut relatif jarang dibandingkan pada masa awal penerapan sistem.

Secara umum, SIPD dinilai mampu menyediakan informasi secara tepat waktu dan mendukung kelancaran operasional perbendaharaan. Ketersediaan data yang cepat dan mutakhir ini berkontribusi pada peningkatan efisiensi kerja serta percepatan proses administrasi keuangan daerah.

5. Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi berkaitan dengan sejauh mana informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna. Kejelasan ini mencakup tampilan sistem, struktur menu, format laporan, serta penggunaan istilah yang digunakan di dalam sistem, sehingga informasi dapat dibaca dan dimanfaatkan tanpa menimbulkan kebingungan.

Berdasarkan hasil wawancara di Bagian Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Klaten, informasi yang disajikan SIPD dinilai cukup jelas dan mudah dipahami. Tampilan sistem yang relatif terstruktur serta format laporan yang konsisten membantu pegawai dalam membaca data, melakukan verifikasi, dan menyusun laporan keuangan. Meskipun pada awal penggunaan diperlukan proses adaptasi, secara umum pengguna dapat memahami alur informasi yang ditampilkan oleh sistem.

Dengan demikian, SIPD dinilai telah mampu menyajikan informasi secara cukup jelas dan mendukung kelancaran proses kerja, khususnya dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah.

Kualitas Sistem (*System Quality*) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Dalam model DeLone dan McLean, kualitas sistem merupakan dimensi yang menilai keberhasilan sistem informasi dari aspek teknis dan fungsional. Kualitas sistem menggambarkan bagaimana kinerja sistem dalam mendukung aktivitas pengguna, mulai dari kemudahan penggunaan, stabilitas, hingga kemampuannya menunjang proses kerja secara berkelanjutan. Dalam konteks Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), kualitas sistem menjadi sangat penting karena SIPD digunakan sebagai sistem utama dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada Bagian Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Klaten.

SIPD dituntut untuk dapat dioperasikan dengan mudah, berjalan secara stabil, serta mampu diakses sesuai kebutuhan kerja. Apabila kualitas sistem tidak optimal, maka proses penatausahaan dan pelaporan keuangan berpotensi mengalami hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas kinerja organisasi. Oleh karena itu, kualitas sistem SIPD dalam penelitian ini dianalisis melalui beberapa indikator utama, yaitu kemudahan penggunaan (*ease of use*), fleksibilitas (*flexibility*), keandalan (*reliability*), kecepatan akses (*response time*), dan keamanan sistem (*security*).

1. Kemudahan Sistem

Kemudahan penggunaan merupakan aspek penting dalam menilai kualitas SIPD di BPKPAD Kabupaten Klaten karena berpengaruh langsung terhadap efisiensi kerja, ketepatan proses penatausahaan, pencairan dana, dan pelaporan keuangan. Sistem yang mudah digunakan membantu pengguna lebih cepat beradaptasi dan meminimalkan kesalahan dalam pengolahan data.

Berdasarkan hasil wawancara, SIPD dinilai cukup mudah digunakan, meskipun pada awal penerapan membutuhkan proses adaptasi akibat peralihan dari SIMDA ke SIPD yang memiliki tampilan, menu, dan alur kerja yang lebih kompleks. Namun, seiring meningkatnya intensitas penggunaan, pegawai mulai terbiasa dan pengoperasian sistem menjadi lebih lancar.

Penggunaan SIPD juga berdampak positif terhadap efisiensi kerja karena mempercepat proses input, verifikasi, dan penyusunan laporan secara terintegrasi serta mengurangi pekerjaan manual. Meskipun demikian, keterbatasan pelatihan membuat proses adaptasi banyak dilakukan secara mandiri dan tingkat kemudahan penggunaan sangat bergantung pada kemampuan pengguna. Selain itu, keterbatasan fleksibilitas pada tahap tertentu juga masih menjadi kendala ketika terjadi kesalahan input.

Secara umum, kemudahan penggunaan SIPD dinilai cukup baik dan mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah, meskipun masih diperlukan peningkatan pelatihan dan penyempurnaan sistem agar pemanfaatannya lebih optimal.

2. Fleksibilitas Sistem

Fleksibilitas sistem dalam SIPD mengacu pada kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan operasional dan dinamika pengelolaan keuangan daerah. SIPD tidak hanya bersifat fleksibel karena berbasis web, tetapi juga dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan data keuangan yang terintegrasi. Di BPKPAD Kabupaten Klaten, SIPD dinilai cukup fleksibel dalam mendukung proses penatausahaan, terutama dalam akses data dan penelusuran informasi keuangan yang memudahkan pelaksanaan tugas sehari-hari.

Namun, fleksibilitas SIPD masih memiliki keterbatasan karena sistem ini mengikuti standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebagian besar alur kerja dan fitur tidak dapat disesuaikan secara mandiri oleh pemerintah daerah, sehingga penyesuaian terhadap kebutuhan spesifik daerah memerlukan waktu dan persetujuan dari pusat. Hal ini menyebabkan fleksibilitas sistem lebih terarah pada kepentingan standarisasi nasional dibandingkan kebutuhan lokal.

Meskipun demikian, SIPD masih memberikan ruang penyesuaian pada tahap input dan verifikasi data sebelum proses finalisasi dilakukan. Setelah tahap tertentu, seperti pencairan dana, data tidak dapat diubah kembali sebagai bentuk pengendalian dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, fleksibilitas SIPD dinilai cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah tanpa mengurangi prinsip pengendalian dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

3. Keandalan Sistem

Keandalan sistem mencerminkan kemampuan SIPD untuk beroperasi secara stabil dan konsisten dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Di Bagian Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Klaten, aspek ini menjadi sangat penting karena seluruh proses penatausahaan dan pencairan dana sangat bergantung pada ketersediaan sistem.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, keandalan SIPD dinilai belum sepenuhnya optimal. Sistem masih mengalami gangguan teknis seperti *server error* dan kesulitan akses, terutama pada periode dengan beban kerja tinggi, seperti akhir tahun anggaran. Kondisi ini menyebabkan tertundanya proses administrasi keuangan yang seharusnya dilakukan melalui SIPD.

Meskipun gangguan tersebut umumnya berasal dari pengelolaan sistem di tingkat pusat dan dapat dipulihkan setelah dilakukan perbaikan, ketergantungan terhadap penanganan teknis dari pusat menjadi keterbatasan bagi daerah. Namun, pada kondisi normal, SIPD tetap dapat digunakan sesuai fungsi dan mampu mendukung proses penatausahaan, pencairan, dan pelaporan keuangan secara terintegrasi.

Secara keseluruhan, keandalan SIPD masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menjaga stabilitas sistem dan kontinuitas layanan, agar dapat mengurangi hambatan kerja serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

4. Kecepatan Sistem

Kecepatan akses merupakan aspek penting dalam menilai kualitas SIPD karena berkaitan dengan kelancaran proses kerja, khususnya di Bagian Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Klaten yang memiliki beban kerja tinggi. Sistem dengan kecepatan akses yang baik akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi keterlambatan administrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kecepatan akses SIPD belum sepenuhnya stabil. Pada kondisi normal, sistem dapat digunakan dengan cukup lancar. Namun, pada periode tertentu, terutama saat jumlah pengguna meningkat atau menjelang akhir tahun anggaran, SIPD sering mengalami penurunan kecepatan, seperti lambat saat login, membuka menu, maupun menyimpan data.

Kondisi ini cukup mengganggu aktivitas kerja karena memperlambat proses input dan verifikasi data, bahkan dalam beberapa kasus menyebabkan pengulangan pekerjaan. Keterlambatan akses umumnya disebabkan oleh faktor teknis di tingkat pusat, terutama keterbatasan kapasitas server dan tingginya trafik penggunaan SIPD secara nasional, sehingga sulit diatasi oleh pemerintah daerah secara mandiri.

Secara keseluruhan, kecepatan akses SIPD masih perlu ditingkatkan, terutama melalui peningkatan kapasitas sistem dan stabilitas server, agar dapat mendukung pelaksanaan tugas perbendaharaan secara lebih efektif, khususnya pada periode dengan intensitas kerja tinggi.

5. Keamanan Sistem

Keamanan sistem merupakan aspek penting dalam menilai kualitas SIPD karena berkaitan dengan perlindungan data keuangan daerah yang bersifat strategis dan sensitif. Sistem yang aman diperlukan untuk mencegah risiko penyalahgunaan data, akses tidak sah, serta gangguan terhadap proses penatausahaan dan pencairan dana.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di BPKPAD Kabupaten Klaten, keamanan SIPD dinilai cukup baik. Sistem telah menggunakan mekanisme akun dan kata sandi individual serta pembagian hak akses berbasis peran (*role-based access*), sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan kewenangannya. Pengaturan ini berfungsi sebagai bentuk pengendalian internal untuk menjaga integritas data dan proses kerja.

Selama penggunaan SIPD, tidak ditemukan kasus kebocoran data atau penyalahgunaan akses. Informan menyatakan bahwa data relatif aman dan tidak dapat diubah tanpa melalui prosedur yang berlaku. Namun, karena pengelolaan sistem dilakukan secara terpusat, pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengendalikan aspek keamanan infrastruktur dan sepenuhnya bergantung pada kebijakan pengelola SIPD pusat.

Selain faktor teknis, keamanan sistem juga dipengaruhi oleh kedisiplinan pengguna dalam menjaga kerahasiaan akun dan mengikuti prosedur penggunaan sistem. Secara keseluruhan, keamanan SIPD di BPKPAD Kabupaten Klaten dapat dinilai cukup memadai, meskipun tetap perlu diperkuat melalui peningkatan kesadaran pengguna dan koordinasi yang lebih baik dengan pengelola sistem pusat.

Kualitas Pelayanan (*Service Quality*) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Dalam model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean (2003), kualitas pelayanan (*service quality*) merupakan dimensi yang menilai sejauh mana dukungan layanan dari pengelola sistem mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Dimensi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis sistem, tetapi lebih menekankan pada bagaimana penyedia sistem memberikan bantuan, pendampingan, serta menangani berbagai permasalahan yang muncul selama sistem digunakan. Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan, kenyamanan, dan keberlanjutan penggunaan sistem dalam mendukung aktivitas organisasi.

Dalam konteks SIPD, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan sebagai pengembang sekaligus pengelola sistem. Oleh karena itu, kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kemendagri menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi SIPD di daerah, termasuk di BPKPAD Kabupaten Klaten, khususnya pada Bagian Perbendaharaan yang sangat bergantung pada sistem ini dalam proses penatausahaan dan pencairan keuangan daerah.

Penilaian kualitas pelayanan SIPD dalam penelitian ini didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu jaminan (*assurance*), empati (*empathy*), dan daya tanggap (*responsiveness*). Ketiga aspek tersebut digunakan untuk menggambarkan bagaimana dukungan layanan diberikan oleh pengelola sistem kepada pengguna, berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan.

1. Jaminan Sistem

Jaminan (*assurance*) mengacu pada kemampuan pengelola SIPD dalam memberikan rasa aman, kepercayaan, dan kepastian kepada pengguna terkait penggunaan sistem. Aspek ini mencerminkan kompetensi pengelola dalam menangani kendala, menjaga keamanan data, serta memastikan bahwa sistem berada dalam pengawasan yang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara, pengguna SIPD di Bagian Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Klaten menyatakan cukup yakin bahwa setiap gangguan sistem akan ditangani oleh pihak Kementerian Dalam Negeri melalui mekanisme helpdesk yang tersedia. Setiap laporan gangguan umumnya mendapatkan respons awal berupa konfirmasi bahwa permasalahan sedang diproses, sehingga pengguna merasa keluhan mereka diperhatikan.

Namun demikian, dari sisi kepastian waktu penyelesaian, jaminan layanan masih dirasakan belum optimal. Beberapa gangguan dapat ditangani dengan cepat, tetapi pada kondisi tertentu, terutama saat beban sistem tinggi atau permasalahan bersifat kompleks, proses perbaikan dapat memakan waktu hingga beberapa hari. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penanganan sudah tersedia, peningkatan kepastian layanan, khususnya terkait durasi penanganan gangguan, masih diperlukan untuk menjaga kepercayaan pengguna.

2. Empati

Empati dalam kualitas pelayanan mencerminkan perhatian dan kepedulian pengelola sistem terhadap kondisi serta kebutuhan pengguna. Aspek ini menjadi penting karena pengguna SIPD, khususnya di bagian Perbendaharaan, memiliki beban kerja tinggi dan terikat oleh tenggat waktu pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara, pengelola SIPD (Kemendagri) dinilai cukup menunjukkan empati kepada pengguna di BPKPAD Kabupaten Klaten. Ketika terjadi gangguan, pengelola umumnya memberikan respons yang sopan, ramah, dan informatif, serta menjelaskan kondisi sistem yang sedang mengalami kendala sehingga dapat dipahami oleh pengguna.

Namun demikian, empati yang diberikan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mempertimbangkan urgensi pekerjaan di daerah. Dalam beberapa kasus, solusi yang diberikan hanya berupa arahan untuk menunggu tanpa adanya alternatif sementara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sikap peduli sudah terlihat, peningkatan pemahaman terhadap kebutuhan operasional pengguna masih diperlukan, terutama pada periode kritis seperti akhir tahun anggaran.

3. Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan kecepatan dan kesiapan pengelola SIPD dalam menanggapi laporan serta menangani permasalahan pengguna. Aspek ini penting karena SIPD digunakan secara intensif dalam proses penatausahaan, penerbitan SP2D, dan pelaporan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Kemendagri dinilai cukup responsif dalam menerima laporan gangguan SIPD. Laporan yang masuk melalui helpdesk umumnya segera mendapatkan respons awal berupa konfirmasi penerimaan atau pemberitahuan bahwa sistem sedang dalam proses penanganan. Hal ini memberikan kepastian kepada pengguna bahwa permasalahan mereka telah ditindaklanjuti.

Namun demikian, meskipun respons awal tergolong cepat, proses penyelesaian masalah tidak selalu berlangsung cepat. Beberapa gangguan memerlukan waktu hingga tiga sampai empat hari, terutama jika berkaitan dengan server pusat atau pembaruan sistem. Kondisi ini menunjukkan bahwa responsivitas dalam komunikasi sudah cukup baik, tetapi efektivitas dan kecepatan penyelesaian masalah masih perlu ditingkatkan agar tidak mengganggu kelancaran pengelolaan keuangan daerah.

Penggunaan (Use) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Dalam model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean, dimensi penggunaan (*use*) menggambarkan sejauh mana sistem informasi dimanfaatkan oleh pengguna dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penggunaan sistem

merupakan indikator penting keberhasilan implementasi, karena sistem yang dirancang dengan baik tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak digunakan secara aktif dan berkelanjutan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, tingkat dan pola penggunaan sistem mencerminkan sejauh mana SIPD telah terintegrasi dalam proses kerja organisasi.

Meskipun SIPD merupakan sistem yang wajib digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah, pemahaman terhadap pola dan maksud penggunaannya tetap penting untuk menilai implementasi SIPD di BPKPAD Kabupaten Klaten, khususnya pada bagian Perbendaharaan. Untuk menggambarkan penggunaan SIPD, penelitian ini menggunakan dua indikator utama, yaitu frekuensi penggunaan (*frequency of use*) dan sifat penggunaan (*nature of use*).

1. Frekuensi Penggunaan

Frekuensi penggunaan dalam model DeLone dan McLean menunjukkan seberapa sering suatu sistem informasi digunakan dalam mendukung aktivitas kerja sehari-hari. Tingginya frekuensi penggunaan mencerminkan bahwa sistem telah terintegrasi dalam proses kerja organisasi dan memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas.

Dalam konteks SIPD, frekuensi penggunaan menjadi indikator penting karena sistem ini digunakan secara rutin dalam proses penatausahaan, verifikasi, dan pencairan dana. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Bagian Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Klaten, SIPD digunakan hampir setiap hari kerja dan telah menjadi bagian dari rutinitas kerja pegawai, terutama dalam penerbitan SP2D dan pengelolaan administrasi keuangan daerah.

Frekuensi penggunaan SIPD meningkat pada periode tertentu, khususnya pada akhir bulan dan menjelang akhir tahun anggaran, ketika volume pekerjaan meningkat dan pegawai harus lebih intensif mengakses sistem untuk memastikan seluruh transaksi diproses tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa SIPD memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan ketepatan waktu administrasi keuangan daerah.

Namun, frekuensi penggunaan SIPD juga sangat dipengaruhi oleh kondisi teknis sistem. Ketika terjadi gangguan seperti *server error* atau penurunan kecepatan akses, pemanfaatan sistem menjadi terhambat dan sebagian pekerjaan harus ditunda. Oleh karena itu, tingginya frekuensi penggunaan SIPD menegaskan bahwa sistem ini telah menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menunjukkan pentingnya menjaga stabilitas dan keandalan sistem agar aktivitas kerja dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

2. Sifat Penggunaan

Sifat penggunaan SIPD di Bagian Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Klaten bersifat wajib, operasional, dan berkelanjutan. SIPD digunakan karena telah ditetapkan sebagai sistem resmi oleh pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga seluruh proses administrasi keuangan harus dilakukan melalui sistem ini dan tidak bersifat opsional bagi pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara, SIPD dimanfaatkan untuk kegiatan inti pengelolaan keuangan daerah, seperti penatausahaan, verifikasi dokumen, pencairan dana, serta pemantauan realisasi anggaran. Penggunaannya menuntut ketelitian dan kehati-hatian karena setiap data yang diinput berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan dan proses pencairan dana. Dengan demikian, sifat penggunaan SIPD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Penggunaan SIPD juga menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi. Ketika sistem berjalan normal, proses kerja dapat dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi, namun ketika terjadi gangguan, aktivitas pengelolaan keuangan menjadi terhambat. Hal ini

menegaskan bahwa SIPD telah menjadi sistem utama dalam mendukung pekerjaan bagian Perbendaharaan.

Meskipun SIPD baru digunakan sejak tahun 2024, pegawai menunjukkan kemampuan adaptasi yang cukup baik. Pengguna secara bertahap menyesuaikan diri dengan sistem melalui pengalaman langsung, diskusi antarpegawai, dan pembelajaran mandiri, sehingga pemanfaatan SIPD semakin optimal seiring meningkatnya pemahaman terhadap sistem.

Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Dalam model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean, kepuasan pengguna merepresentasikan penilaian subjektif pengguna terhadap pengalaman mereka dalam menggunakan sistem informasi. Kepuasan ini mencerminkan sejauh mana sistem mampu memenuhi kebutuhan, harapan, dan tuntutan pekerjaan pengguna, baik dari sisi fungsional, kemudahan penggunaan, maupun manfaat yang dirasakan. Tingkat kepuasan pengguna juga berperan penting dalam menentukan keberlanjutan penggunaan sistem dalam aktivitas kerja sehari-hari.

Dalam penerapan SIPD di Bagian Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Klaten, kepuasan pengguna menjadi aspek yang penting mengingat SIPD merupakan sistem yang relatif baru dan menggantikan aplikasi sebelumnya. Peralihan ini menuntut perubahan pola kerja serta penyesuaian terhadap alur dan mekanisme sistem yang baru. Oleh karena itu, tingkat kepuasan pengguna mencerminkan sejauh mana SIPD dapat diterima dan dirasakan manfaatnya dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, secara umum pengguna menyatakan cukup puas terhadap penggunaan SIPD, terutama ketika sistem berada dalam kondisi normal dan dapat diakses dengan lancar. SIPD dinilai membantu pengelolaan penatausahaan keuangan secara lebih terintegrasi, khususnya dalam proses penerbitan SP2D, verifikasi data, dan pemantauan realisasi anggaran. Keberadaan SIPD membuat alur kerja menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan lebih baik dibandingkan proses manual.

Namun demikian, tingkat kepuasan pengguna belum sepenuhnya optimal. Gangguan teknis seperti *server error*, lambatnya akses sistem, serta ketergantungan pada penanganan dari pusat menjadi faktor utama yang menurunkan kepuasan pengguna. Ketika SIPD mengalami gangguan, pekerjaan yang bergantung pada sistem harus ditunda, terutama pada periode dengan beban kerja tinggi seperti akhir bulan dan akhir tahun anggaran.

Selain kendala teknis, kepuasan pengguna juga dipengaruhi oleh proses adaptasi terhadap sistem. Pada awal penerapan, pengguna membutuhkan waktu untuk memahami alur kerja dan fitur SIPD, terlebih karena keterbatasan pelatihan dan sosialisasi resmi. Namun, seiring meningkatnya pengalaman dan pemahaman pengguna, tingkat kenyamanan dan kepuasan terhadap sistem juga cenderung meningkat.

Kepuasan pengguna juga berkaitan dengan persepsi terhadap kesesuaian SIPD dengan harapan. Sebagian pengguna menilai SIPD telah memenuhi fungsi dasarnya sebagai sistem keuangan daerah terintegrasi, meskipun masih terdapat pandangan bahwa beberapa fitur perlu dikembangkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan operasional di daerah.

Dari sisi dukungan layanan, keberadaan helpdesk dan respons dari pengelola sistem turut membantu menjaga tingkat kepuasan pengguna, meskipun waktu penyelesaian gangguan tidak selalu cepat. Komunikasi yang informatif dan sikap yang kooperatif memberikan rasa aman bagi pengguna, namun ketidakpastian durasi perbaikan tetap menjadi catatan penting.

Secara keseluruhan, kepuasan pengguna SIPD di Bagian Perbendaharaan BPKPAD Kabupaten Klaten berada pada kategori cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan. SIPD telah memberikan manfaat nyata dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah, tetapi peningkatan stabilitas sistem, pengembangan fitur, serta penguatan pelatihan dan dukungan teknis tetap diperlukan agar tingkat kepuasan pengguna dapat meningkat secara berkelanjutan.

Manfaat Bersih (*Net Benefit*) Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Dalam model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean, manfaat bersih (*net benefits*) menggambarkan dampak akhir penerapan sistem informasi terhadap individu dan organisasi. Dimensi ini menilai sejauh mana sistem memberikan nilai tambah nyata, seperti peningkatan efisiensi kerja, produktivitas pegawai, transparansi dan akuntabilitas, serta dukungan terhadap pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di BPKPAD Kabupaten Klaten Bagian Perbendaharaan, penerapan SIPD dinilai memberikan manfaat yang cukup signifikan. Salah satu manfaat utama yang dirasakan adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas kerja, khususnya dalam proses penatausahaan dan penerbitan SP2D, karena seluruh proses dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem. Dibandingkan dengan sistem sebelumnya (SIMDA), SIPD mengurangi pekerjaan manual dan duplikasi input data, sehingga alur kerja menjadi lebih ringkas dan terstruktur.

Selain itu, SIPD juga meningkatkan produktivitas pegawai. Dengan dukungan data yang tersedia secara real time, pegawai dapat melakukan pengecekan, verifikasi, dan pemantauan realisasi anggaran dengan lebih cepat. Hal ini sangat membantu kelancaran pekerjaan, terutama pada periode dengan beban kerja tinggi.

Manfaat lain yang dirasakan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Setiap proses tercatat secara sistematis dan dapat ditelusuri kembali, sehingga memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban serta meminimalkan potensi kesalahan maupun penyimpangan.

Dari sisi pengambilan keputusan, SIPD membantu menyediakan data keuangan yang lebih terstruktur dan mudah diakses, seperti informasi realisasi anggaran dan posisi kas daerah. Meskipun keputusan strategis tidak sepenuhnya bergantung pada sistem, SIPD memberikan dasar informasi yang lebih akurat dan aktual bagi pengambilan keputusan.

Namun demikian, manfaat SIPD belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala teknis, terutama gangguan sistem dan ketergantungan pada penanganan dari pemerintah pusat. Ketika sistem mengalami gangguan, proses pengelolaan keuangan menjadi tertunda dan berdampak pada kinerja organisasi.

Secara keseluruhan, penerapan SIPD di BPKPAD Kabupaten Klaten Bagian Perbendaharaan memberikan manfaat bersih yang positif, terutama dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Meskipun masih terdapat keterbatasan teknis, SIPD telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern dan terintegrasi.

PENUTUP

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKPAD Kabupaten Klaten, khususnya pada Bagian Perbendaharaan, secara umum telah berjalan cukup baik dan memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Ditinjau dari model DeLone dan

McLean, SIPD mampu menyediakan informasi yang relatif akurat dan relevan, mendukung proses kerja, serta meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun demikian, masih dijumpai kendala teknis dan gangguan sistem pada waktu tertentu yang memengaruhi kelancaran operasional. Secara keseluruhan, SIPD telah menjadi bagian penting dalam aktivitas kerja sehari-hari dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan efektivitas dan produktivitas kinerja di lingkungan BPKPAD Kabupaten Klaten.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, disarankan agar pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri terus meningkatkan stabilitas dan keandalan sistem SIPD, khususnya pada periode dengan beban akses tinggi, serta memperkuat kualitas layanan dukungan teknis agar penanganan gangguan dapat dilakukan lebih cepat dan jelas. Di sisi lain, BPKPAD Kabupaten Klaten perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan serta mendorong penggunaan SIPD secara lebih konsisten dan bertahap agar manfaat sistem dapat dioptimalkan. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan metode campuran dan memperluas cakupan objek penelitian guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi SIPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. CV PUSTAKA SETIA (1st ed.). Bandung.
- Benny Eko Supriyanto. (2024). Transparansi Penggunaan Dana Transfer dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. Retrieved from <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/artikel/3798-transparansi-penggunaan-dana-transfer-dalam-meningkatkan-pelayanan-publik.html>
- DeLone & McLean. (2018). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4). Retrieved from <https://www.ukbimframework.org/standards-guidance/%0Ahttps://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2>
- Iwan Ahmad Puji Santoso. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 1–10.
- Kurniawan, S. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD): Menyelaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah. *Warta Pemeriksa BPK*, VII, 44–46.
- Nasution, M. I., & M.Si, N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Siswandi. (2017). *Administrasi Negara*. Citra Harta Prima.

Wurara, C. N. C., Stefanus Sampe, Donald K. Monintja, Michael Mamentu, Fanley N. Pangemanan, & Steeva G. Rondonuwu. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kota Tomohon. *Journal Publicuho*, 7(2), 802–810.
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.436>